



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT BANK KALBAR
UNIT KERJA : PT BANK KALBAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PABALI MUSA
2. Jabatan : KETUA DEWAN PENGAWAS SYARIAH
3. NHK : 145616

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	260.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 171 m2/150 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000		
2. Tanah Seluas 25.600 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000		
3. Tanah Seluas 286 m2 di KAB / KOTA SAMBAS, Rp. 75.000.000		
4. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	51.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1500 S Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	2.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	42.330.700
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	51.906.889
F. HARTA LAINNYA	Rp.	8.000.000
Sub Total	Rp.	415.737.589

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **415.737.589**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.